

**MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN AGROFORESTRI
DI WILAYAH KELOLA KPHL RAJABASA
(Kasus Di Desa Sumur Kumbang
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Oleh

ROZANTINA YUNICA



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

SOCIAL CAPITAL IN AGROFORESTRY MANAGEMENT IN KPHL RAJABASA

**(Case In Sumur Kumbang Village
Sub Distric Kalianda Distric Lampung Selatan)**

By

ROZANTINA YUNICA

Agroforestry management by communities in the state forest area, particularly protection forest, is closely associated with public participation which influenced by social capital. This study was conducted to determine how social capital becomes an essential element in supporting the development of forest management through agroforestry cropping pattern in the Protected Forest Management Unit areas. The data collection was done by interviewing the management and members of the Village Forest Management Institute (LPHD) of Sumur Kumbang Village, as well as related stakeholders. Those data were analyzed descriptively by examining the social capital elements namely confidence, solidarity, cooperation, roles, rules, networks and levels of social capital. The results shown that trust, solidarity and the network was good; but cooperation and rules was medium, and the aspect of role was not good. Based on these elements, the level of social capital categorized into elementary social capital which shown by the attitude of LPHD members who prefer the self-

Rozantina Yunica

interest and willing to cooperate as far as beneficial for himself. The government is capable to manage the social capital in communities, so then could strengthen the local institutions to support the management of protected areas in the region in a sustainable manner through agroforestry cropping pattern.

Key words : agroforestry, community based forest management, protection forest management unit, sosial capital, village forest.

ABSTRAK

MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN AGROFORESTRI DI WILAYAH KELOLA KPHL RAJABASA (Kasus di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

ROZANTINA YUNICA

Pengelolaan agroforestri oleh masyarakat di wilayah hutan negara, khususnya hutan lindung, sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh modal sosialnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana modal sosial menjadi unsur pokok dalam mendukung pengembangan pengelolaan hutan melalui pola tanam agroforestri di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pengurus dan anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Sumur Kumbang, serta stakeholders terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengkaji unsur-unsur modal sosial berupa: kepercayaan, solidaritas, kerjasama, peran, aturan, jaringan dan tingkat modal sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan, solidaritas dan jaringan tergolong baik; namun kerjasama dan aturan tergolong dalam keadaan sedang, serta peran tergolong ke dalam keadaan tidak baik. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka tingkat modal sosial dapat dikategorikan ke dalam

Rozantina Yunica

elementary social capital. Hal ini ditunjukkan dengan sikap anggota LPHD yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dan bersedia bekerjasama bila menguntungkan dirinya. Pemerintah dapat menggunakan modal sosial di masyarakat dan melakukan penguatan kelembagaan lokal untuk mendukung pengelolaan hutan lindung di wilayahnya secara berkelanjutan melalui pola tanam agroforestri.

Kata kunci: agroforestri, hutan desa, kesatuan pengelolaan hutan lindung, modal sosial, pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

**MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN AGROFORESTRI
DI WILAYAH KELOLA KPHL RAJABASA
(Kasus di Desa Sumur Kumbang
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

ROZANTINA YUNICA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA KEHUTANAN**

pada

**Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

: **MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN
AGROFORESTRI DI WILAYAH KELOLA KPHL
RAJABASA (Kasus di Desa Sumur Kumbang
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung
Selatan)**

Nama Mahasiswa

: **Rozantina Yunica**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1214151057

Jurusan

: Kehutanan

Fakultas

: Pertanian



1. Komisi Pembimbing

Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.

NIP 197402222003121001

Rommy Qurniati, S.P., M.Si.

NIP 197609122002122001

2. Ketua Jurusan Kehutanan

Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si.

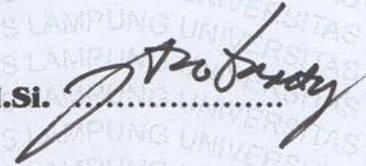
NIP 197705032002122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

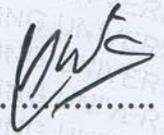
Ketua

: Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.



Sekretaris

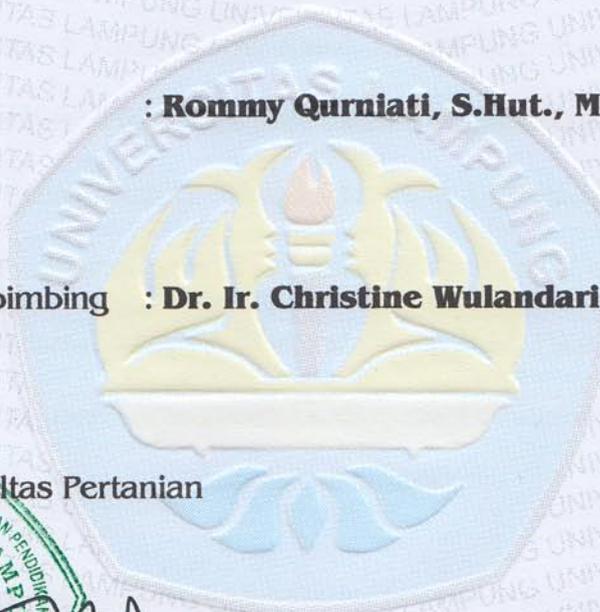
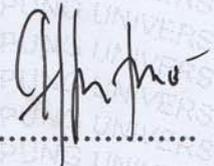
: Rommy Qurniati, S.Hut., M.Si.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.



2. Dekan Fakultas Pertanian



Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

NIP 196110201986031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Februari 2017

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 25 Juni 1994 di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Rozali dan Ibu Nelly Septina Sahibur. Pendidikan penulis diawali pada tahun 1999 yaitu di Taman Kanak-Kanak Kartini, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 02 Palapa pada tahun 2000 hingga tahun 2006. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, penulis juga menjadi Anggota Utama dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan (Himasyk). Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung pada bulan Januari sampai Maret 2015. Penulis menjadi Asisten Mahasiswapada mata kuliah Perencanaan Kehutanan pada semester ganap periode 2015/2016. Penulis menjadi *field officer* dalam penyelesaian penelitian *Assessing Ecological Service and Food Security Potentials of Agroforestry Landscape in Southeast Asia (Case of 1. ^fakiling forest Reserve in Philippines and Way Betung Watershed in Indonesia)* yang didukung oleh Seameo

Biotrop pada Tahun 2015. Penulis telah melaksanakan Praktik Umum (PU) kehutanan di BKPH Purworejo KPH Kedu Selatan, Jawa Tengah pada bulan Agustus sampai September tahun 2016.

*Dalam kerendahan hati ini ku dedikasikan karyaku ini kepada
orang orang tersayang, Ayahanda Rozali Ibunda Nelly
Septina Kakanda Oke Yulawati serta Adinda Novia Faradhila*

SANWACANA

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat Serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW selaku Rasul Allah SWT atas berkat beliau kita mendapat petunjuk ke jalan yang lurus.

Skripsi dengan judul "**Modal Sosial dalam Pengelolaan Agroforestri di Wilayah Kelola KPHL Rajabasa (Kasus di Desa Sumur Kumbang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)**" adalah salali satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Universitas Lampung.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan saran berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mengueapkan terima kasih kepada berbagai pihak sebagai berikut.

1. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., selaku pembimbing utama atas Dimbingan, saran, dan motivasi yang tetan diberikan daiam, proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Rommy Qurniati, S.P., M.Si. selaku pembimbing kedua dan pebimbing Akademik atas bimbingan, kritik, saran, dan motivasi yang telah di berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P., selaku penguji utama skripsi atas kritik dan saran yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Melva Riniarti, S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
5. Seluruh dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung atas ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
7. Kepada kedua orang tua yang telah menjadi inspirasi terbesar penulis, selaku menyelipkan namaku disetiap doanya, mendoakan disetiap langkahku dan keberhasilanku. Terima kasih atas dukungan moral dan materi seta motivasi yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah IPTEKS bidang kehutanan.

Bandar Lampung, 09 Februari 2017

Penulis,

Rozantina Yunica

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	3
C. Manfaat Penelitian.....	4
D. Kerangka Pemikiran.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kesatuan Pengelolaan Hutan.....	6
B. Agroforestri.....	8
C. Kehutanan Masyarakat.....	9
D. Modal sosial.....	10
III. METODE PENELITIAN	14
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	14
B. Alat dan Objek Penelitian.....	14
C. Batasan Penelitian.....	15
D. Populasi dan Pengambilan Sampel.....	16
E. Metode Pengumpulan data.....	18
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	18
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	21
A. Letak dan Luas KPHL Rajabasa.....	21
B. Keadaan Biofisik KPHL Rajabasa.....	22
C. Sejarah KPHL Rajabasa.....	23
D. Potensi Wilayah KPHL Rajabasa.....	25
E. Desa Sumur Kumbang.....	29

V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Modal Sosial dalam Pengelolaan Agroforestri.....	34
B. Tingkat Modal Sosial dalam Pengelolaan Agroforestri.....	35
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	41
A. Simpulan.....	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	45
Gambar 52—56.....	52
Surat Penetapan Areal Kerja Hutan Desa	58

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Unsur-Unsur Modal Sosial	12
2. Batasan Penelitian.....	15
3. Kontinum Modal Sosial.....	19
4. Tutupan Lahan di Wilayah Kphl Model Rajabasa.....	24
5. Jenis-Jenis Satwa Liar yang Dapat Ditemukan di Wilayah Kphl Model Rajabasa	26
6. Luas Wilayah Desa.....	29
7. Struktur Mata Pencaharian	31
8. Jenis Tanaman di Lahan Kelola.....	32
9. Lembaga Masyarakat.....	32
10. Variabel Modal Sosial.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	5
2. Peta Lokasi Penelitian.....	14
3. Lahan Kelola Agroforestri di Wilayah KPHL Rajabasa.....	52
4. Lahan Silvofishery di Wilayah KPHL Rajabasa.....	52
5. Tanaman Kopi di Lahan Kelola Agroforestri.....	53
6. Pemisahan Buah Kakao Dengan Kulitnya.....	53
7. Penjemuran Cengkeh Hasil Agroforestri.....	54
8. Penjemuran Kopi Hasil Agroforestri.....	54
9. Wawancara Pihak KPHL Rajasaba.....	55
10. Wawancara Ketua LPHD Desa Sumur Kumbang.....	55
11. Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Sumur Kumbang.....	56
12. Wawancara Masyarakat Desa Sumur Kumbang.....	56

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan. Anomsari (2015), mengungkapkan bahwa dengan adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu mewujudkan keadaan hutan menjadi lebih baik, karena masyarakat mengawasi hutan dari kerusakan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pemerintah memiliki pengaruh yang sangat penting di berbagai aspek pengelolaan hutan. Salampessy *et al.* (2014), menjelaskan bahwa kelestarian sumberdaya hutan dapat bertahan dengan menerapkan modal budaya dan pengetahuan lokal masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan seperti yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah pesisir Ambon. Febryano *et al.*

(2014), menunjukkan bagaimana tingkat modal sosial masyarakat mengelola hutan secara lestari dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan keberadaan kelembagaan lokalnya. Menurut Putri *et al.* (2015), partisipasi masyarakat dapat membimbing masyarakat agar memiliki sikap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut penelitian Bulkis *et al.* (2011), tingkat modal sosial yang tinggi dapat mempengaruhi pengelolaan hutan. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Hartoyo (2012), bahwa keberhasilan pelestarian hutan dapat dilihat karena kuatnya modal sosial terutama mengenai kepercayaan, jaringan sosial dan norma. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori Putnam *et al.* (1995), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat terlaksana jika sumberdaya yang dikelola dapat diperoleh manfaatnya; sehingga perlu adanya penerapan jenis tanaman yang tidak hanya menghasilkan produk kayu saja. Salah satu alternatif yang telah dilakukan yaitu dengan menerapkan pola agroforestri pada lahan yang dikelola dengan skema perhutanan sosial salah satunya adalah HD.

Nair (1995), mengungkapkan bahwa agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan terpadu, dilaksanakan dengan mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian dan atau hewan ternak baik bersamaan maupun beriringan. Pengelolaan agroforestri di beberapa daerah dilakukan dengan menerapkan modal sosial. Modal sosial yang diterapkan oleh masyarakat sangat penting untuk diketahui, agar terlaksana dengan baik. Guillén *et al.* (2015), mengungkapkan bagaimana modal sosial mendukung kegiatan pengelolaan hutan melalui pola tanam agroforestri.

Kajian tentang modal sosial sudah banyak dilakukan, namun kajian tersebut belum

menjelaskan secara mendalam bagaimana penerapan modal sosial yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi pengelolaan sumberdaya hutan yang ada pada kawasan lindung. Sangat penting untuk mengetahui modal sosial masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah (Wulandari, 2016). Saat ini hutan lindung di Indonesia merupakan wilayah kelola dari sebuah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

B. Rumusan Masalah

Berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan hutan lindung seperti deforestasi dan degradasi, salah satunya diakibatkan oleh tingginya kebergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam hutan yang dikelola masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat mengelola hutan dengan pola agroforestri dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh modal sosial masyarakat.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana modal sosial menjadi elemen pokok dalam mendukung pengembangan pengelolaan hutan secara agroforestri?
2. Bagaimana tingkat modal sosial dalam mendukung pengembangan pengelolaan agroforestri?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan modal sosial sebagai elemen pokok dalam mendukung pengembangan pengelolaan hutan dengan pola agroforestri.
2. Mendeskripsikan tingkat modal sosial dalam mendukung pengembangan agroforestri.

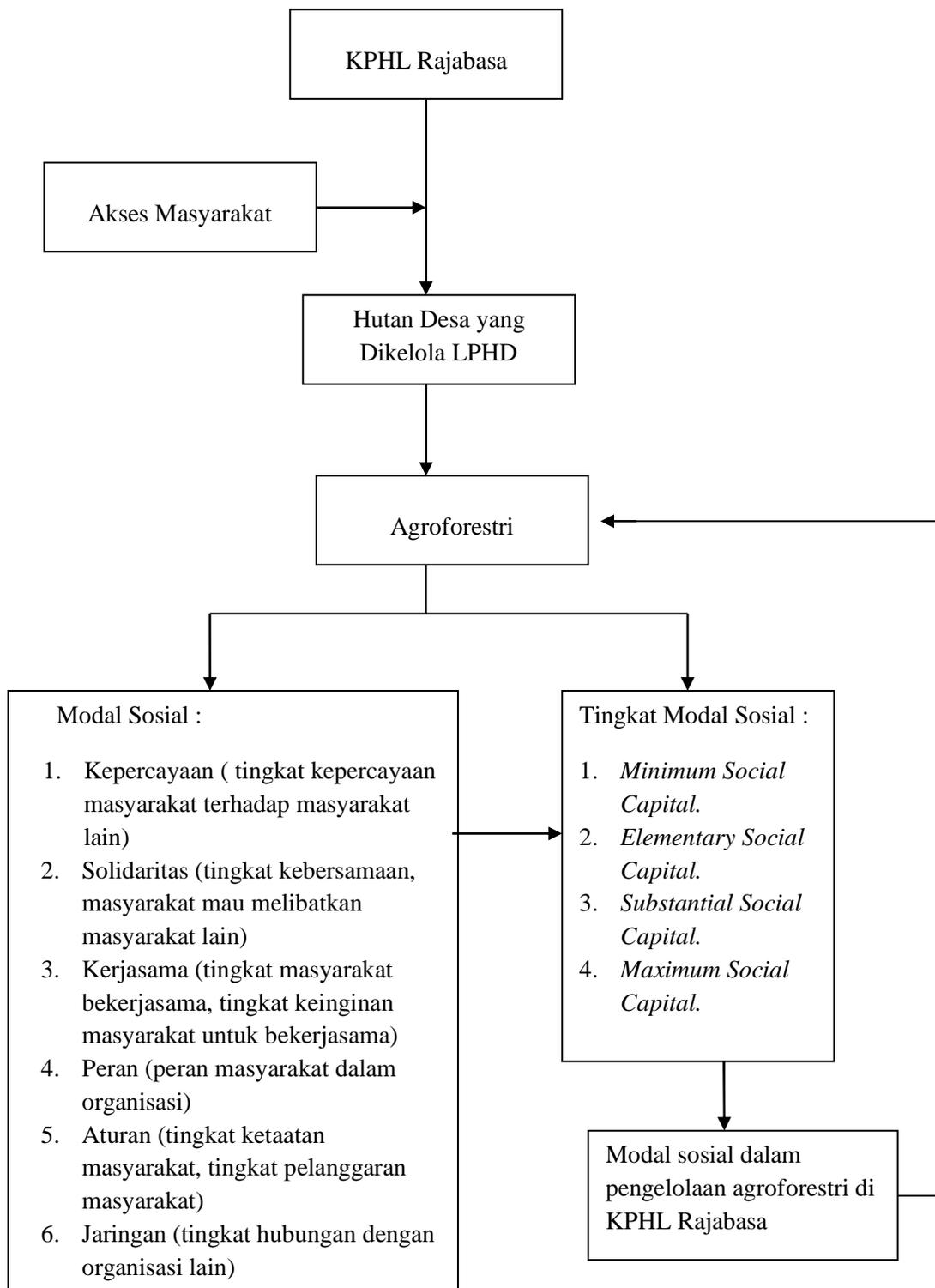
D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan, agar terwujudnya pengelolaan hutan yang sejahtera, adil dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat serta pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan hutan secara agroforestri.

E. Kerangka Pemikiran

Program kehutanan masyarakat memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat dilakukan dengan menerapkan pola agroforestri. Agroforestri yang selama ini berjalan dilakukan dengan menerapkan modal sosial yang ada pada masyarakat, namun belum diketahui bagaimana modal sosial masyarakat dapat mendukung pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan hal tersebut sangat penting diketahui agar modal sosial yang ada dapat dipertahankan keberadaannya. Unsur-unsur modal sosial yang diamati meliputi kepercayaan, kerjasama, solidaritas, aturan, peranan dan jaringan (Uphoff, 1999), setelah mengetahui modal sosial yang ada di masyarakat

maka dapat diketahui bagaimana level modal sosial masyarakat yang terdiri dari *Minimum Social Capital*, *Elementary Social Capital*, *Substantial Social Capital* dan *Maximum Social Capital* seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesatuan Pengelolaan Hutan

Menurut PP No.6 (2007) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diartikan sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyebutkan pengertian KPH adalah unit pengelolaan hutan terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Firdaus, 2012). Sebagian besar kawasan KPH telah ditetapkan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan tanaman, sedangkan selebihnya wilayah KPH ditetapkan untuk hutan desa dan pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) (Puspariani, 2008).

Kesatuan Pengelolaan Hutan tersebut dapat berbentuk KPHK, KPHL maupun KPHP tergantung dari fungsi kawasan yang luasnya dominan (Rizal, 2009).

Dengan adanya KPH diharapkan ada pihak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kawasan hutan, sehingga pengelolaan hutan menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penataan hutan pada setiap unit atau kesatuan pengelolaan hutan, maka disusunlah rencana pengelolaan hutan. Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin

tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk kemakmuran rakyat. Perencanaan tersebut dilakukan dengan transparan, partisipatif, bertanggung jawab, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah (Damik, 2013).

Pengelolaan KPH memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemegang IUPHHK-HA, dan lembaga pendukung (LSM, perguruan tinggi dan lembaga keuangan), serta masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan pengelola KPH yang kuat termasuk dukungan SDM untuk dapat memfasilitasi para pihak yang mengelola KPH. Sebagai suatu unit pengelolaan hutan lestari, maka KPH perlu ditata menjadi unit-unit usaha sesuai fungsi kawasan hutan dan potensi setiap tapak. Unit-unit usaha KPH harus didukung oleh batas-batas unit usaha yang jelas dan diakui oleh semua pihak, tersedianya sarana prasarana yang memadai, dukungan dana yang cukup dan berkelanjutan serta tersedianya pasar yang kompetitif terhadap produk unit-unit usaha KPH (Supratman, 2007).

Masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan KPH. Menurut Hasibuan (2005), bahwa manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia merupakan perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Sumberdaya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Indikator sumberdaya terdiri dari staf (pelaksana yang merupakan sumberdaya yang paling utama dan menentukan dalam pelaksanaan kegiatan), informasi (segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kebijakan), wewenang (otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik) dan

fasilitas (sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan publik). Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumberdaya manusia. Salah satu ketidakefektifan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah kekurangan sumberdaya manusia baik dari kuantitas maupun kualitas. Sumberdaya manusia yang diperlukan adalah sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan KPH (Ruhimat, 2010).

B. Agroforestri

Sistem agroforestri memiliki karakter yang berbeda dan unik dibandingkan sistem pertanian monokultur. Adanya beberapa komponen berbeda yang saling berinteraksi dalam satu sistem (pohon, tanaman dan atau ternak) membuat sistem ini memiliki karakteristik yang unik, dalam hal jenis produk, waktu untuk memperoleh produk dan orientasi penggunaan produk. Jenis produk yang dihasilkan sistem agroforestri sangat beragam, yang bisa dibagi menjadi dua kelompok yaitu produk untuk komersial (misalnya bahan pangan, buah-buahan, hijauan makanan ternak, kayu bangunan, kayu bakar, daun, kulit, getah) dan pelayanan jasa lingkungan (Widianto *et al.*, 2003).

Dalam definisinya istilah agroforestri banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pengertian yang berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing. Namun dapat disimpulkan bahwa agroforestri adalah suatu sistem penggunaan lahan yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan hasil total secara lestari, dengan cara mengkombinasikan tanaman pangan/pakan ternak dengan tanaman pohon pada sebidang lahan yang sama, baik secara bersamaan atau secara

bergantian, dengan menggunakan praktek-praktek pengolahan yang sesuai dengan kondisi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya setempat (Hairiah *et al.*, 2003).

Praktek pengelolaan hutan secara agroforestri merupakan salah satu program pemerintah dalam pengelolaan hutan yaitu kehutanan masyarakat. Kehutanan masyarakat adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas, atau kelompok, pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik untuk memenuhi kebutuhan individu/rumah tangga dan masyarakat, serta diusahakan secara komersial ataupun sekedar untuk subsistensi (Suharjito, *et al.*, 2000).

C. Kehutanan Masyarakat

Program kehutanan masyarakat dibentuk oleh pemerintah dalam rangka melibatkan masyarakat petani hutan dalam pengelolaan hutan, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pengelolaan hutan tersebut dengan pembagian yang adil dan proposional (Winata dan Yuliana, 2010). Kehutanan masyarakat adalah segala bentuk pengelolaan hutan dan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara-cara tradisional dalam bentuk kelompok atau unit usaha berbasis kelompok. Program ini juga bermaksud memberikan arahan pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dan profesional (Firmansyah, 2013).

Kehutanan masyarakat dilatarbelakangi oleh kegagalan pengelolaan sebelumnya yang berbasis negara. Dalam program tersebut pemerintah sebagai komando, maka semua kegiatan bersifat sentralistik. Penanganan permasalahan hutan selalu

dilakukan secara polisional (penegakan hukum yang kaku). Hutan dianggap keramat sehingga masyarakat tidak dapat mengelola hutan tanpa izin dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan, 2012).

Pelaksanaan program kehutanan masyarakat membawa dampak bagi masyarakat desa hutan yaitu perubahan sosial masyarakat desa hutan baik masyarakat yang mengelola dan yang tidak mengelola. Dampak bagi masyarakat yang mengelola lahan yaitu terjadi peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan terjadinya mobilitas secara vertikal dari masyarakat kelas bawah menjadi masyarakat kelas atas (Puspaningrum, 2011).

D. Modal Sosial

Modal sosial adalah akumulasi dari beragam tipe sosial, psikologis, budaya, kognitif, kelembagaan dan aset-aset yang terkait yang dapat meningkatkan kemungkinan manfaat bersama dari perilaku kerjasama (Uphoff, 1999). Modal sosial mengacu kepada ciri organisasi sosial seperti jaringan, norma, kepercayaan dan ciri lainnya yang memfasilitasi koordinasi dan kinerja agar saling menguntungkan (Yuliarmi, 2011). Inayah (2012) menyatakan bahwa modal sosial merupakan sumberdaya yang muncul dari hasil interaksi dalam kelompok masyarakat yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan (*trust*), jaringan-jaringan sosial dan norma yang membentuk struktur masyarakat yang berguna untuk koordinasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

Modal sosial (*social capital*) dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai

kelompok. Sejumlah permasalahan muncul di permukaan karena para ekonom penganut mazhab neo-klasik menganggap bahwa faktor-faktor kultural dari perilaku (*behavior*) manusia sebagai makhluk rasional dan memiliki kepentingan diri (*self interested*) menjadi sesuatu yang *given*/dikesampingkan (Fukuyama, 1992). Modal sosial dapat digunakan untuk segala kepentingan, namun tanpa ada sumber daya fisik dan pengetahuan budaya yang dimiliki, maka akan sulit bagi individu-individu untuk membangun sebuah hubungan sosial. Hubungan sosial hanya akan kuat jika ketiga unsur di atas berkesinambungan (Hasbullah, 2006).

Kategori modal sosial dibedakan menjadi *social bounding* (perekat sosial), merupakan modal sosial yang lebih banyak bekerja secara internal dan solidaritas yang dibangun karenanya menimbulkan kohesi sosial yang lebih bersifat mikro dan komunal karena itu hubungan yang terjalin didalamnya lebih bersifat eksklusif (nilai, kultur, persepsi, tradisi dan adat istiadat). Sedangkan *social bridging* (jembatan sosial) timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya dan lebih banyak menjalin jaringan dengan potensi eksternal yang melekat. *Social linking* merupakan hubungan sosial di antara beberapa level dari kekuatan sosial atau status sosial dalam masyarakat tanpa membedakan kelas dan status sosial tersebut (Ramli 2007).

Uphoff (1999), membagi unsur-unsur modal sosial menjadi dua kategori yang saling berhubungan, yaitu struktural dan kognitif (Tabel 1). Secara teoritis, kedua kategori itu seolah-olah bisa hadir sendiri-sendiri, namun dalam kenyataannya akan sangat sulit modal sosial itu terbentuk tanpa kedua aspek tersebut, karena secara intrinsik saling terkait. Aset modal sosial struktural bersifat ekstrinsik dan

dapat diamati, sementara aspek kognitif tidak dapat diamati, namun keduanya saling terkait di dalam praktik, aset struktural datang dari hasil proses kognitif.

Tabel 1. Unsur-unsur modal sosial.

	Struktural	Kognitif
Sumber dan perwujudannya/manifestasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peran dan aturan • Jaringan dan hubungan antar pribadi lainnya • Prosedur-prosedur dan preseden-preseden 	<ul style="list-style-type: none"> • Norma-norma • Nilai-nilai • Sikap • Keyakinan
Domain/ranah	Organisasi sosial	Budaya sipil/kewargaan
Faktor-faktor dinamis	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan horisontal • Hubungan vertikal 	Kepercayaan, solidaritas, kerjasama, kemurahan hati/kedermawanan
Elemen umum	Harapan yang mengarah pada perilaku kerjasama, yang akan menghasilkan manfaat bersama	

Sumber: Uphoff (1999).

Unsur struktural merupakan beragam bentuk organisasi sosial. Peranan (*roles*) adalah perihal atau tindakan spesifik baik formal maupun informal dalam struktur sosial. Aturan (*rules*) adalah segala ketentuan yang berlaku baik yang tersirat maupun yang tersurat. Peranan (*roles*) dan aturan (*rules*) mendukung empat fungsi dasar dan kegiatan yang diperlukan untuk tindakan kolektif, yaitu pembuatan keputusan, mobilisasi dan pengelolaan sumberdaya, komunikasi dan koordinasi, dan resolusi konflik. Hubungan-hubungan sosial membangun pertukaran (*exchange*) dan kerjasama (*cooperation*) yang melibatkan barang material maupun non material. Jejaring (*networks*) adalah pola pertukaran dan

interaksi sosial yang menggambarkan hubungan antar masyarakat. Peranan, aturan dan jejaring memfasilitasi tindakan kolektif yang saling menguntungkan (*mutually beneficial collective action*/MBCA). Bentuk struktural dari modal sosial (peranan, aturan, prosedur, preseden dan jaringan) yang memfasilitasi terciptanya manfaat bersama dari tindakan kolektif (MBCA) dengan jalan menurunkan biaya transaksi, mengkoordinasikan berbagai usaha, menciptakan harapan, membuat kemungkinan berhasil lebih besar dan menyediakan jaminan tentang bagaimana orang lain akan bertindak dan sebagainya (Uphoff, 1999). Unsur kognitif datang dari proses mental yang menghasilkan gagasan/pemikiran yang diperkuat oleh budaya dan ideologi. Norma, nilai, sikap dan keyakinan memunculkan dan menguatkan saling ketergantungan positif dari fungsi manfaat dan mendukung MBCA. Unsur kognitif memiliki dua orientasi, yaitu orientasi ke arah pihak/orang lain dan orientasi mewujudkan tindakan.

B. Alat dan Objek Penelitian

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu kamera, daftar pertanyaan (kuisisioner) dan *netbook*. Objek yang diteliti yaitu pengurus kelompok tani beserta anggota kelompok LPHD Desa Sumur Kumbang, Direktur LSM Wanacala, kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa Sumur Kumbang, Kepala KPHL Rajabasa dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.

C. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini secara garis besar dapat tergambar pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Batasan Penelitian

Variabel	Deskripsi	Indikator
Kepercayaan	Rasa percaya dalam berhubungan dengan orang lain yang dimiliki warga masyarakat dalam mempersepsikan seseorang berdasarkan perasaan dan kondisi yang dialami	Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap masyarakat lain.
Kerjasama	Cara tindakan bersama dengan orang lain untuk kebaikan bersama dalam proses saling membantu di antara sesama warga komunitas untuk mencapai tujuan bersama	a. Tingkat masyarakat bekerjasama. b. Jenis aktivitas yang dikerjakan bersama-sama. c. Tingkat keinginan masyarakat untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan
Solidaritas	Aktivitas/kegiatan yang dilakukan dengan membantu orang lain di luar kelompok/komunitas sehingga turut mendukung dalam pengelolaan dan pelestarian <i>hutan</i>	a. Tingkat kebersamaan masyarakat dengan masyarakat lainnya. b. Masyarakat mau melibatkan masyarakat lain yang tidak memiliki lahan garapan.
Aturan	Ketentuan yang berlaku baik yang tersirat maupun yang tersurat yang berlaku dalam kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai pengontrol dan pengatur perilaku.	a. Tingkat ketaatan masyarakat dalam mematuhi aturan. b. Tingkat pelanggaran masyarakat terhadap aturan tertulis maupun tidak tertulis. c.

Tabel 2. Lanjutan

Jaringan	Pola pertukaran dan interaksi sosial yang menggambarkan hubungan antar masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Akses masyarakat dalam memanfaatkan hasil agroforestri. b. Akses didalam grup dan jaringan c. Jumlah anggota d. Tingkat demokrasi didalam masyarakat. e. Tingkat hubungan dengan kelompok lain.
----------	---	--

D. Populasi dan Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *purposive*, *random* dan *snowball sampling*. Desa Sumur Kumbang terdiri atas kelompok masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Jumlah total populasi masyarakat yang menjadi anggota LPHD yaitu 300 orang. Pengambilan sampel untuk anggota LPHD dilakukan dengan menggunakan sampling, karena jumlah populasi lebih dari 100 orang. Penentuan jumlah sampel anggota kelompok dilakukan dengan menggunakan Rumus Slovin (Arikunto, 2011) yaitu:

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1} = \frac{300}{300(15)^2 + 1} = 35 \text{ sampel}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel
 N = jumlah populasi
 E = batas error 15 %
 1 = bilangan konstan

Dari rumus diatas maka diperoleh sampel anggota LPHD sebanyak 35 responden.

Selain masyarakat Desa Sumur Kumbang, terdapat juga pihak instansi terkait seperti KPHL Rajabasa, tokoh masyarakat setempat, Dinas Kehutanan Kabupaten Kalianda dan LSM yang mendampingi masyarakat dalam mengelola hutan.

Pengambilan sampel untuk instansi terkait dilakukan dengan *purposive sampling* karena tidak semua anggota dari instansi mengetahui keadaan pengelolaan hutan di Desa Sumur Kumbang sehingga pengambilan sampel dengan sengaja ditujukan kepada individu kunci yang berjumlah 7 orang. Individu kunci merupakan orang yang sangat memahami permasalahan atau objek penelitian. Sehingga jumlah seluruh responden yang diamati dengan cara *purposive sampling* dan *random sampling* yaitu sebanyak 42 responden. Kemudian dilakukan wawancara mendalam kepada responden kunci untuk melengkapi data. Pada metode ini responden yang diamati sebanyak 3 orang yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat atau tetua masyarakat, sehingga jumlah seluruh responden dengan ketiga metode tersebut berjumlah 45 orang.

Jenis data dalam penelitian ini meliputi.

1. Data primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan observasi dan wawancara menggunakan kuesioner yang dibuat sebelumnya. Data yang dikumpulkan adalah.

- a. Karakteristik sosial ekonomi yaitu mata pencaharian, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendapatan pokok, pendapatan agroforestri, jenis kelamin, umur, luas lahan kelola, jumlah tanggungan keluarga dan jumlah anggota keluarga yang bekerja.
- b. Modal sosial yaitu kepercayaan, solidaritas, kerjasama, peran, aturan dan jaringan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mencari, menganalisis, mengumpulkan, mempelajari buku–buku dan literatur lainnya yang dipakai sebagai bahan referensi seperti; gambaran umum Desa Sumur Kumbang dan Rencana Pembangunan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Rajabasa.

E. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara.

1. Wawancara terstruktur kepada responden atau informan dengan menggunakan kuesioner. Wawancara terstruktur dilakukan untuk mendapatkan data berupa karakteristik sosial ekonomi dan modal sosial.
2. Wawancara mendalam (*In-depth interview*) merupakan wawancara kepada informan dengan menggunakan panduan pertanyaan, dengan melibatkan hubungan emosi guna mendapatkan data sebanyak-banyaknya dari responden serta memastikan bahwa jawaban yang didapatkan sebelumnya dapat dipercaya.
3. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan terhadap masyarakat dalam mengelola agroforestri. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data berupa karakteristik sosial ekonomi.
4. Studi pustaka dengan dokumen–dokumen dan literatur yang ada.

F. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data kualitatif dan akan dianalisis secara deskriptif dengan menjabarkan variabel kepercayaan, solidaritas, kerjasama, peran, aturan dan jaringan menggunakan pendekatan teori

kontinum modal sosial dari Uphoff (1999). Modal sosial pada penelitian ini berada pada level meso, yaitu hanya meneliti modal sosial antar masyarakat terhadap masyarakat lainnya atau hubungan antar organisasi dan pihak pemerintahan tetapi cakupannya masih didalam satu provinsi. Tingkat modal sosial ditentukan dengan melihat pada tingkat modal sosial yang didominasi oleh masyarakat tersebut dari segi nilai, isu, strategi, pilihan, teori dan fungsi utilitas (Tabel 3).

Tabel 3. Kontinum modal sosial

<i>Minimum social capital</i>	<i>Elementary social capital</i>	<i>Substantial social capital</i>	<i>Maximum social capital</i>
Tidak mementingkan kesejahteraan orang lain; memaksimalkan kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain.	Hanya mengutamakan kesejahteraan sendiri; kerjasama terjadi sejauh bisa menguntungkan diri sendiri.	Komitmen terhadap upaya bersama; kerjasama terjadi bila juga memberi keuntungan pada orang lain.	Komitmen terhadap kesejahteraan orang lain; kerjasama tidak terbatas pada kemanfaatan sendiri, tetapi juga kebaikan bersama .
Nilai-nilai : Hanya menghargai kebesaran diri sendiri.	Efisiensi kerjasama.	Efektifitas kerjasama.	<i>Altruisme</i> dipandang sebagai hal yang baik.
Isu-isu pokok : <i>Selfisness</i> : Bagaimana sifat seperti ini bisa dicegah agar tidak merusak masyarakat secara keseluruhan.	Biaya transaksi : Bagaimana biaya ini bisa dikurangi untuk meningkatkan manfaat bersih bagi masing-masing orang.	Tindakan kolektif : Bagaimana kerjasama (penghimpunan sumberdaya) bisa berhasil dan berkelanjutan.	Pengorbanan diri : Sejauh mana hal hal seperti patriotism dan pengorbanan demi fanatisme agama perlu dilakukan.
Strategi : Jalan sendiri	Kerjasama taktis	Kerjasama strategi	Bergabung atau melarutkan kepentingan individu.
Kepentingan bersama:			

Tidak jadi pertimbangan	Instrumental	Institusional	Transendental
Pilihan : Keluar bila tidak puas	<u>Bersuara</u> , berusaha untuk memperbaiki syarat pertukaran.	<u>Bersuara</u> , mencoba memperbaiki keseluruhan produktivitas.	<u>Setia</u> , menerima apapun jika hal itu baik untuk kepentingan bersama secara keseluruhan.
Teori permainan : <i>Zero-sum</i> : apabila kompetisi tanpa adanya hambatan, pilihan akan menghasilkan <i>negative-sum</i> .	<i>Zero-sum</i> : Pertukaran yang memaksimalkan keuntungan sendiri bias menghasilkan <i>positive sum</i> .	<i>Positive-sum</i> : Ditujukan untuk memaksimalkan kepentingan sendiri dan kepentingan untuk mendapatkan manfaat bersama .	<i>Positive-sum</i> : Ditujukan untuk memaksimalkan kepentingan bersama dengan mengesampingkan kepentingan sendiri.
Fungsi utilitas : <u>Independen</u> , Penekanan diberikan bagi utilitas sendiri.	Independen, dengan mewujudkan keperluan diri sendiri melalui kerjasama.	Fungsi utilitas : Independen, penekanan diberikan bagi utilitas sendiri.	Interdependen positif, dengan lebih banyak penekanan diberikan bagi kemanfaatan orang lain daripada keuntungan diri sendiri.

Sumber: Uphoff (1999).

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak dan Luas KPHL Rajabasa

Secara geografis kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa berada pada $5^{\circ} 44' 47,88''$ - $5^{\circ} 49' 19,42''$ LS dan $105^{\circ} 35' 48,00''$ - $105^{\circ} 41' 21,00''$ BT. Luas wilayah Gunung Rajabasa adalah 5.160 ha terdiri dari 176 ha merupakan hutan primer, 3.148 ha hutan sekunder dan 1.836 ha non hutan dan panjang keliling batas luar kawasan 60,22 km. Secara administrasi pemerintahan register 3 Gunung Rajabasa berada di 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Bakauheni dan Penengahan (terdapat 22 desa di sekelilingnya yang berbatasan langsung dengan Register 3 Gunung Rajabasa). Adapun batas-batas wilayah KPHL Rajabasa adalah.

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Betung
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda

B. Keadaan Biofisik KPHL Rajabasa

Tanah di wilayah KPHL Rajabasa termasuk jenis tanah Andosol Coklat Tua Kemerahan dengan tingkat kepekatan tanah terhadap erosi adalah agak peka (Lembaga Penelitian Tanah Bogor, 1971). KPHL Model Rajabasa formasi

geologinya terdiri dari bahan induk tua intermedier. Batuan Gunung Rajabasa termasuk ke dalam kelompok Phono Tephrite dan Basaltic Trachy Andesite (Le Bas *et al.*, 1986). Seri batuan ini masih dalam kelompok basa intermedian.

Berdasarkan kategori type iklim Schmidt dan J.H Ferguson, kawasan Hutan Lindung Register 3 Gunung Rajabasa termasuk kedalam wilayah dengan kategori iklim B dengan rata-rata curah hujan 1.298 mm/tahun dengan intensitas hari hujan 17 mm/hari. Kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa merupakan sumber air bagi penduduk Kalianda dan sekitarnya dan termasuk ke dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung. Kebanyakan sungai-sungai yang ada merupakan sungai kecil yang bermuara langsung ke laut karena jarak hutan lindung relatif dekat dengan laut.

Sungai terbesar yang ada di kawasan hutan lindung oleh masyarakat setempat disebut dengan Way Rajabasa. Kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa termasuk ke dalam tipe Hutan Hujan Tropis (*Tropical Rain Forest*), sedangkan menurut formasi edafis/ketinggian tempat, termasuk ke dalam zona Hutan Hujan Tropis Bawah (*Low Tropical Rain Foresti*). Tipe ekosisten Gunung Rajabasa menurut ketinggiannya adalah termasuk ke dalam Sub Montana yang bercirikan terdiri dari beragam jenis tumbuhan, serta ditandai dengan adanya pohon-pohon yang besar dan tinggi/dominan seperti damar (*Shorea Javanica*), acung, gintung, gelam, kedaung, dadap, kiara dan banyak lainnya dengan diameter $\pm 40 - 80$ m. Disamping itu juga terdapat berbagai jenis *epiphyt* seperti anggrek, paku-pakuan serta tumbuhan bawah lainnya.

Wilayah KPHL Rajabasa jika dilihat berdasarkan topografinya, terdiri dari beberapa group vulkan andestik. Beberapa vulkan andestik tersebut terdiri dari lereng tengah, lereng bawah dan dataran vulkan bergelombang. Sebagai wilayah pegunungan, topografi di KPHL Rajabasa tergolong berat dengan kelerengan berkisar $\pm 25 -45 \%$ atau termasuk ke dalam kelas lereng 4 (curam) dan 5 (sangat curam).

C. Sejarah KPHL Rajabasa

Berdasarkan Besluit Residen Lampung Distrik No. 307 Tanggal 31 Maret 1941 Gunung Rajabasa seluas 4.900 ha ditetapkan sebagai Register 3 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/91 tanggal 31 Januari 1991 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Lampung. Kawasan tersebut kemudian ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Menhut Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 sebagai Kawasan Hutan Lindung (KHL) Gunung Rajabasa. KHL Gunung Rajabasa ditetapkan menjadi KPHL Rajabasa melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 367/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Penetapan KPHL Rajabasa. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 Tanggal 15 September 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) KPHL Model Rajabasa berada pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan, karena luasan wilayah kerja KPHL Rajabasa seluas 5.200 ha secara keseluruhan berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan. Sampai saat ini belum ada izin pemanfaatan hutan maupun izin penggunaan kawasan hutan, baik oleh masyarakat maupun pihak swasta/korporasi, di wilayah KPHL Model Rajabasa.

Tingkat perambahan hutan di wilayah KPHL Rajabasa tergolong cukup tinggi, dimana sebagian lahan hutannya telah berubah fungsi menjadi lahan pertanian dan semak belukar. Terdapat 22 desa di sekitar KPHL Rajabasa dan 1.147 kepala keluarga yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada wilayah KPHL Rajabasa. Pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.403/Menhut-II/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa, maka sebagian wilayah KPHL Rajabasa dapat dikelola oleh masyarakat melalui skema hutan desa dengan pola agroforestri.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui KPHL Rajabasa melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan pola agroforestri. Meskipun izin definitif pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat belum pernah diterbitkan, namun KPHL Model Rajabasa telah melakukan pemberdayaan masyarakat diwilayahnya. Kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat dilakukan dengan pola agroforestri yang mengkombinasikan tanaman perkebunan dan kehutanan untuk memperbaiki tutupan lahannya. Hal tersebut diwujudkan melalui pemberian bibit durian, petai, sonokeling dan kaliandra oleh pihak KPHL Rajabasa. Masyarakat juga menanam damar, rotan, durian, pala, petai dan jengkol di lahan garapannya. Saat ini masyarakat tidak diperkenankan lagi untuk membuka atau memperluas lahan garapannya.

D. Potensi Wilayah KPHL Rajabasa

1. Potensi Flora

Berdasarkan data dari citra lansat tahun 1999, sebagian besar lahan (61,01%) di wilayah KPHL Model Rajabasa merupakan Hutan Lahan Kering Sekunder dan hanya sebagian kecil (3,41%) yang hutan primer yang terjaga di wilayah ini.

Secara lengkap data tutupan lahan di wilayah KPHL Rajabasa disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Tutupan Lahan di Wilayah KPHL Model Rajabasa.

No.	Tutupan lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Hutan lahan kering primer	175,98	3,41
2.	Hutan lahan kering sekunder	3.147,88	61,01
3.	Semak/belukar	124,38	2,41
4.	Pertanian lahan kering	151,81	2,94
5.	Pertanian lahan kering bercampur semak	1.559,69	30,23
	Jumlah	5.159,75	100,00

Sumber: RPHJP KPHL Rajabasa (2014).

Berdasarkan hasil analisis vegetasi diketahui bahwa potensi kayu di wilayah KPHL Model Rajabasa tergolong cukup besar dengan volume mencapai 139,32 m per hektar. Kayu-kayu tersebut terdiri dari jenis-jenis komersil kelas tinggi seperti medang, kungkil, bebeka, arang-arang, balam, bengkal dan damar. Selain kayu KPHL Rajabasa juga memiliki hasil hutan bukan kayu seperti: getah damar, rotan, durian, pala, petai, jengkol dan lain-lain. Di wilayah ini juga terdapat banyak buah-buahan lokal yang saat ini keberadaannya sudah sangat sulit dijumpai seperti kecapi, ketupak dan rukam.

2. Potensi Fauna (Satwa)

Kawasan KPHL Rajabasa merupakan habitat yang sangat baik bagi kehidupan sebagian besar satwa liar tropis. Diwilayah ini dijumpai banyak satwa liar yang tergolong dilindungi dan sangat dilindungi seperti yang disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Jenis-Jenis Satwa Liar yang Dapat Ditemukan di Wilayah KPHL Model Rajabasa

No.	Jenis	Nama Ilmiah	Nama Lokal
1.	Aves (Burung)	<i>Buceros sp</i>	Burung Rangkon
		<i>Spizaetus batelsi</i>	Elang
		<i>Galus galus</i>	Ayam HutanMerah
		<i>Buceros bucernis</i>	Rangkong
		<i>Strix leptorammica</i>	Burung Hantu
		<i>Haliastur indus</i>	Elang Bondol
		<i>Iktinaetusmalayensis</i>	Elang hitam
		<i>Milvus migrans</i>	Elang paria
		<i>Collacalia maxima</i>	Walet sarang hitam
		<i>Corvus enca</i>	Gagak hitam
2.	Mamalia	<i>Panthera tigris sumatraensis</i>	Harimau Sumatera
		<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu
		<i>Panthera pardus</i>	Macan tutul
		<i>Cervus timorensis</i>	Rusa
		<i>Muntiacus muntjak</i>	Kijang
		<i>Babyrousa babyrousa</i>	Babi
		<i>Hustrx brachyurn</i>	Landak
		<i>Laricus insignis</i>	Tupai
3.	Primata	<i>Hylobates malayanus</i>	Siamang
		<i>Macaca fascicularis</i>	Monyet
4.	Reptil	<i>Presbytis cristata</i>	Lutungabu-abu
		<i>Manis javanicus</i>	Ular Biawak Trenggiling

Sumber: RPHJP KPHL Rajabasa (2014).

3. Potensi Wisata

a. Wisata Pendidikan

KPHL Model Rajabasa terletak pada ketinggian 0 — 1.282 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terletak pada titik P.67 yang merupakan puncak tertinggi dari Gunung Rajabasa dengan ketinggian 1.282 meter di atas permukaan laut. Dengan rentang ketinggian tempat yang begitu lebar, jenis flora dan fauna yang mampu hidup di wilayah ini juga sangat beragam, mulai flora dan fauna dataran rendah sampai dataran tinggi. Beragamnya jenis flora dan fauna tersebut merupakan potensi yang sangat besar untuk kegiatan pendidikan, pengkajian, pariwisata, penangkaran dan pemanfaatan lain secara bijaksana dengan menganut azas kelestarian.

b. Wisata Alam dan Petualangan

KPHL Rajabasa memiliki vegetasi yang cukup baik (tutupan lahan hutan mencapai 63,42 %) merupakan potensi besar bagi pengembangan wisata alam dan petualangan di wilayah ini. Lokasinya yang dekat dengan Kota Kalianda (8,5 km dari pusat kota) dan perairan teluk Lampung serta Selat Sunda menambah indah panorama di kawasan ini, terutama jika dilihat dari ketinggian. Lokasi Gunung Rajabasa juga dekat dengan kawasan pariwisata pantai seperti Batu Kapal, Pantai Canti, Banding Resort, Pantai Wartawan dan Pantai Kahai. Dari pantai tersebut bisa melihat pesona Anak Gunung Krakatau. Beberapa objek andalan sebagai daya tarik wisata di wilayah ini antara lain.

1) Danau

Terdapat sebuah danau yang terletak di atas puncak gunung. Danau ini sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai objek wisata alam dan ziarah. Ditepi danau ini terdapat batu cukup. Terdapat mitos bahwa seberapapun orang yang berdiri atau duduk di atas batu tersebut akan selalu cukup.

2) Air panas Way Belerang

Merupakan sebuah mata air alami yang mengeluarkan air panas dengan kandungan belerang. Sumber air panas ini dapat dijangkau dengan mudah karena lokasinya yang dekat dengan desa (hanya 2 km dari Desa Kecapi) dan terdapat jalan *track* dengan kondisi yang sangat baik.

3) Air terjun

KPHL Rajabasa memiliki potensi air terjun yang sangat indah yaitu, air terjun Way Kalam, air terjun Tanjung Heran, air terjun Cugung, air terjun Semanak, air terjun Pangkul Sukaraja, air terjun Canti, air terjun Kecapi dan air terjun/Way Guyuran.

4) Potensi Pertambangan dan Energi

Wilayah KPHL Rajabasa memiliki potensi langka yaitu energi panas bumi (*geothermal*). Belum diketahui secara pasti besarnya energi yang dapat dimanfaatkan dari sumber panas bumi tersebut, namun saat ini wacana untuk pemanfaatan sumber panas bumi tersebut sudah mulai didengungkan. Selain panas bumi terdapat juga sumber air panas Way Belerang yang mengandung

potensi mineral berupa belerang. Belerang merupakan zat yang telah diketahui secara luas berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit kulit.

E. Desa Sumur Kumbang

1. Batas Wilayah Desa Sumur Kumbang

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kesugihan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Rajabasa
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Buah Berak
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang

2. Luas Wilayah Desa

Penggunaan lahan terbesar adalah untuk pemukiman dan hutan desa. Penggunaan lahan untuk hutan desa masih cukup luas dan ketergantungan masyarakat terhadap lahan tersebut masih cukup tinggi seperti yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Luas Wilayah Desa Sumur Kumbang.

Penggunaan lahan	Luas
Pemukiman	378 ha
Pertanian	0 ha
Hutan Desa	217 ha
Ladang	0 ha
Hutan Suaka Marga Satwa	0 ha
Perkantoran	0 ha
Sekolah	0,80 ha
Jalan	2 km
Lapangan Sepak Bola	0,75 ha

Sumber: monografi Desa Sumur Kumbang.

3. Orbitasi

Orbitasi Desa Sumur Kumbang ke ibukota Kecamatan Kalianda dan ibukota Kabupaten Lampung Selatan adalah.

- a. Jarak ke ibukota kecamatan terdekat : 3,5 km
- b. Lama jarak ke ibukota kecamatan terdekat : 15 menit
- c. Jarak ke ibukota kabupaten terdekat : 5 km
- d. Lama jarak ke ibukota kabupaten terdekat : 20 menit

4. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pertumbuhan penduduk

Desa Sumur Kumbang terdiri atas 330 kepala keluarga (KK), 638 orang laki-laki dan 597 orang perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk di desa ini hanya sebanyak 3 orang atau setara dengan 0,24% dimana pada tahun sebelumnya berjumlah 1232 kemudian ditahun selanjutnya berjumlah 1235.

5. Pendidikan

Tidak semua responden menuntaskan pendidikannya. Terdapat 225 masyarakat yang tidak tamat sekolah dan 15 orang yang mengalami buta huruf. Meskipun demikian terdapat juga masyarakat yang sedang menjalani pendidikan. Terdapat 577 orang di SD/MI, 378 orang di SMP/MTs dan 110 orang di SMA/MA. Terdapat juga masyarakat yang sudah menuntaskan pendidikan bahkan sampai jenjang sarjana sebanyak 15 orang.

6. Sarana pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Sumur Kumbang masih sangat minim, karena hanya terdapat 2 buah gedung TK/PAUD dan 2 buah gedung SD/MI sarana pendidikan lanjut seperti SMP/MTs dan SMA/SMK belum ada.

7. Keadaan ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Sumur Kumbang cukup beragam. Petani dan tukang ojek merupakan mata pencaharian yang mendominasi di desa ini. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap lahan seperti yang disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Struktur mata pencaharian

Jenis pekerjaan	Jumlah
Petani	263
Pedagang	26
PNS	3
Tukang	47
Guru	4
Bidan	1
Perawat	-
TNI/POLRI	1
Supir/ojek	52
Buruh	270
Pensiunan	1
Jasa sewaan	2
Swasta	10

Sumber : monografi Desa Sumur Kumbang

Petani merupakan jenis pekerjaan yang mendominasi di Desa Sumur Kumbang. Bertani yang dimaksud di desa ini bukan hanya menanam jenis tanaman tetapi juga memelihara ternak dan ikan. Jenis tanaman yang dominan di lahan kelola masyarakat adalah kakao. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanaman kakao merupakan tanaman pokok yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat seperti yang disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Jenis tanaman di lahan yang kelola masyarakat

Jenis tanaman dan ternak	Luas/jumlah ternak
Padi sawah	11 ha
Kakao	91 ha

Kelapa	10 ha
Kopi	8 ha
Kambing	73
Ayam	400
Sapi	7
Ikan	1000

Sumber: monografi Desa Sumur Kumbang.

8. Lembaga masyarakat

Lembaga masyarakat yang ada di Desa Sumur Kumbang salah satunya adalah LPHD. LPHD merupakan lembaga masyarakat yang terdiri dari masyarakat pengelola hutan desa. Nama-nama lembaga di Desa Sumur Kumbang disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Lembaga

Nama	Jumlah
LPM	12
Pengajian	10
Arisan	15
Simpan pinjam	20
Kelompok tani	10
Karang taruna	12
Risma	2
Risel	1
LPHD	15

Sumber: monografi Desa Sumur Kumbang.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Agroforestri yang terdapat di Desa Sumur Kumbang sudah terbentuk sejak lama, namun karena kebutuhan hidup masyarakat semakin tinggi maka wilayah kelola tersebut menjadi terdegradasi. Agroforestri yang awalnya sudah terbentuk tersusun oleh tanaman damar, durian dan cengkeh. Tanaman-tanaman berkayu penyusun agroforestri tersebut mulai digantikan menjadi tanaman perkebunan berupa kakao dan kopi yang menurut masyarakat nilai ekonominya lebih tinggi. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintahan baik Dinas Kehutanan maupun KPHL Rajabasa, kesadaran masyarakat mulai meningkat untuk memperbaiki sistem agroforestri tersebut, saat ini masyarakat dibantu oleh KPHL mulai menanam tanaman pala.
2. Modal sosial dari unsur kepercayaan, solidaritas dan jaringan dalam pengelolaan agroforestri yang ada di Desa Sumur Kumbang tergolong baik. Hal ini dilatarbelakangi oleh hubungan kekerabatan yang sangat erat antar anggota LPHD yang merupakan satu kesatuan masyarakat di Desa Sumur Kumbang. Modal sosial dari unsur kerjasama dan aturan tergolong dalam kategori sedang; sementara modal sosial dari segi peran termasuk ke dalam kategori tidak baik.

3. Berdasarkan unsur-unsur modal sosial maka tingkatannya dapat dikategorikan ke dalam *elementary social capital*, yang berarti kepentingan diri sendiri dari anggota LPHD lebih diutamakan; namun mereka tetap bersedia bekerjasama bila kerjasama yang akan dilakukan berdampak positif bagi dirinya.

B. Saran

Modal sosial yang baik, berupa kepercayaan, solidaritas dan jaringan dapat digunakan oleh pihak KPHL Rajabasa untuk mendukung pengelolaan lahan oleh masyarakat di wilayahnya secara berkelanjutan melalui pola tanam agroforestri. Di sisi lain, penguatan kelembagaan lokal mutlak diperlukan untuk meningkatkan modal sosial yang berada dalam kategori tidak baik sampai sedang, seperti: peran, kerjasama dan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anomsari, E. T. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Kasus di Kecamatan Karangayam Kebumen). *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*. 3(16) : 1-16.
- Arikunto, S. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka cipta. Jakarta.
- Bulkis, S., Ali. S., Salman. D., dan Rahmadhanih. 2011. Penguatan Kelembagaan Lokal Melalui Pendekatan Modal Sosial di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. 8(1) : 0—8.
- Cahyono, B. dan Adhitama, A. 2012. Peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani tembakau di Kabupaten Wonosobo. *Proceedings of Conferences in Business. Accounting and Management (CBAM)*. 1(1):131—144. 1 Desember 2012.
- Ekawati, S., dan Nurrochman. R. O. 2014. Hubungan Modal Sosial dengan Pemanfaatan dan Kelestarian Hutan Lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 2(1) : 40-53.
- Ebink, H. 2013. Memperkuat Modal Sosial Masyarakat. <http://kangebink.blogspot.com/2013/10/menguatkan-modal-sosial-masyarakat.html>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 19.00 WIB.
- Fadli. 2007. *Modal sosial dalam percepatan pembangunan desa pasca tsunami kasus pembangunan perumahan dan peningkatan pendapatan keluarga di beberapa desa di Kabupaten Aceh Besar*. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 120 Hlm.
- Febryano, I. G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., and Hidayat, A. 2014. The Roles and Sustainability of Local Institution of Mangrove Management in Pahawang Island. *Jurnal Manajemen Hutan*. 20(2) : 69-76.
- Firdaus, A.Y. 2012. *Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Hak Masyarakat Terhadap Hutan*. Edisi ketiga Jakarta. FEUI.

- Firmansyah, E. 2013. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Kawasan Hutan Lindung Desa Mandala Mekar Kecamatan Jati Waras Kabupaten Tasik Malaya*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fukuyama, F. 2002. *The Great Desruption: Hakikat Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial*. CV Qalam. Yogyakarta.
- Guillén, L. A., Wallin, I., and Brukas, V. 2015. Social capital in small-scale forestry: a local case study in Southern Sweden. *Journal ScienceDirect* 53 : 21—28.
- Hairiah, K., Sardjono, M. A., dan Sabarnuridin. 2003. Pengantar Agroforestri. *Bahan Ajaran Agroforestri I*. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Office. Bogor.
- Hartoyo, 2012. *Penguatan modal sosial dalam pelestarian hutan mangrove di Pulau Pahawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran*. Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Dies Natalis FISIP Unila : 100-103.
- Hasbullah, J. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Cetakan pertama: MR-United Press. Jakarta. 169 Hlm.
- Inayah, 2012. Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. *Jurnal Pembangunan Humanivora* . (1) : 43—49.
- Islam, F. F. 2014. Implementasi Program Hutan Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) (Studi di Desa Jambi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Administrasi Publik*. 1 (7) : 1.
- Junaidi, M. 2015. Studi Evaluasi Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kemuning Asri. *Jurnal Ilmiah proghresif*. 12 (34) : 15—22.
- Jusuf, Y dan Rauf, F. 2011. Studi Pengusulan Hutan Desa Di Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 6 (2) : 79—91.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2012. Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa Mampu Meningkatkan Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi. Artikel Berkala Ekonomi. No. 5: 1 5—6.
- Kementerian Kehutanan. 2007. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan*. Jakarta. 45 Hlm.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Jakarta. 45 Hlm.
- Khususiyah, N. 2013. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di DAS Konto Malang : Pembelajaran Keberhasilan dan Kegagalan Program*. Prosiding Seminar Nasional Agroforestri. World Agroforestry Center-ICRAF : 525—530.
- Khususiyah, N., Suyanto., dan Buana. Y. 2009. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat : Pembelajaran Keberhasilan dan Kegagalan Program*. Laporan Singkat. World Agroforestry Center-ICRAF. Brief No. 01 : 1—4.
- Lawang, Z.M. 2005. *Kapital Sosial dalam Prespektif Sosiologi*. FISIP UI Press. Jakarta. 203 Hlm.
- Lesmana, D., Ratina, R. dan Jumriani. 2011. Hubungan persepsi dan faktor-faktor sosial ekonomi terhadap keputusan petani mengembangkan pola kemitraan petani plasma mandiri kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Kelurahan Bantuas Kecamatan Ralaran Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Pembangunan*. 8(2): 8—17.
- Mulyono, M. M. B. 2012. *Modal Sosial dalam Pengelolaan Kebun Hutan (Dukuh) di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan*. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 263 Hlm.
- Nair, P. K. R. 1993. *An Introduction to Agroforestry*. International Center For Research In Agroforestry (ICRAF). Buku. Kluwer Academic publishers. Amsterdam. 513 Hlm.
- Puspaningrum, D. 2011. Pelembagaan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Dampaknya Bagi Masyarakat Desa Hutan. *J-Sep*. 5 (3) : 1—14.
- Puspariani, J. 2008. *Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)*. Skripsi. Model Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Putnam, R. D. Leonardi, R., dan Nonetti, R. Y. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Putri, R. W., Qurniati, R., dan Hilmanto, R. 2015. Karakteristik Petani dalam Pengembangan Hutan Rakyat di Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*. 3 (2) : 89—98.

- Ramli. 2007. *Institusi Lokal Sebagai Modal Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Rizal, A. 2009. Pengaruh Profitability dan Opportunity Set Terhadap Kebijakan Dividen Tunai. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 2(2) : 187—200.
- Ruhimat, I. S. 2010. Implementasi kebijakan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7(3): 169—178.
- Salampessy, M. L., Febryano, I. G., Martin, E., Siahaya, M. E., dan Papilaya, R. 2014. *Cultural Capital Of The Communities In The Mangrove Conservation In The Coastal Areas Of Ambon Dalam Bay, Moluccas, Indonesia*. *Procedia Environmental Science*. 23 : 222—229.
- Soekanto, S. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Buku. Rajawali Pers. Jakarta. 192 Hlm.
- Suharjito, D., Khan, A., Djatmiko, W. A., Sirait, M. T., dan Evelyn, S. 2000. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Kerjasama FKMM-Ford Foundation. Yogyakarta: Aditya Media.
- Supratman. 2007. *Desain Model Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar. 78 hlm.
- Syahyuti. 2008. Peran sosial (social capital) dalam perdagangan hasil pertanian Agro Ekonomi. 26(1): 32—43.
- Uphoff, N. 2000. *Understanding Social Capital: Learning From the Analysis and Experience of Participation In Dasgupta and Serageldin (Eds). 2000 Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Buku. The World Bank. Washington DC. 440 Hlm.
- Widianto., Hairirah, K., Suharjito, D., dan Sardjono, M. A. 2003. Fungsi Dan Peran Agroforestri. *Bahan Ajaran Agroforestri*. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Office. Bogor.
- Winata, A., dan Yuliana. E, 2010. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani*. Laporan Penelitian Madya. Sukabumi. Universitas Terbuka.
- Yuliarmi, N. 2013. Peran modal Sosial dalam pemberdayaan industri kerajinan di Provinsi Bali. *Jurnal Udayana*. 1(1) 7—15.